WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 1, November 2025

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN KOMPETENSI APARATUR NEGARA TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DENGAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI PEMERINTAH KOTA BINJAI

Carina Kinsky

Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email*: carina.kinsky@gmail.com
*Corresponding email: carina.kinsky@gmail.com

Abstract

Fraud is one of the most important issue in Binjai City Government. Failures in e-government implementation and the whistleblowing system, along with incompetence among state apparatus, have created opportunities for fraud. This study aims to analyze the influence of Good Governance and State Apparatus Competence on Fraud Prevention in the Binjai City Government, as well as to examine the role of the Whistleblowing System as a moderating variable. The study uses a quantitative associative approach and analyzes data with Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) through SmartPLS software. In this study, researchers used primary data collected directly through interviews and questionnaires that had been tested for validity, reliability, and hypothesis testing. The sampling technique used in this study was saturation sampling, where the research population consisted of 33 Regional Apparatus Organizations within the Binjai City Government, with 99 respondents. The results show that Good Governance and Competency Of State Apparatus have a significant positive effect on Fraud Prevention. Additionally, the Whistleblowing System strengthens these relationships and serves as an important moderating control. This implies that improving governance and competence must be accompanied by an effective whistleblowing system. Therefore, Binjai City Government should focus on enhancing governance, competence, and the whistleblowing system to create a more transparent and accountable environment.

Keyword:
Good Governance, Competency Of State Apparatus, Fraud Prevention, Whistleblowing System

PENDAHULUAN

Fenomena *fraud* di Indonesia tidak terlepas dari lemahnya kesadaran dan pengendalian risiko korupsi. Hal ini tercermin dalam skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) Indonesia tahun 2024 yang berada pada angka 37 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara. Indeks CPI yang rendah ini mengindikasikan masih lemahnya kesadaran dan sistem pengendalian terhadap risiko korupsi di berbagai sektor (Transparency International, 2024).

Pada pemerintah Kota Binjai, pencegahan *fraud* juga belum dapat dikatakan efektif. Meskipun Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Kota Binjai meningkat dari 93,51 di tahun 2022 dan 93,81 di tahun 2023 menjadi 94,40 di tahun 2024, namun hal ini belum dapat dijadikan indikator utama keberhasilan pencegahan *fraud* di Pemerintah Kota Binjai. Rendahnya upaya pencegahan *fraud* masih terlihat dari maraknya kasus korupsi yang terjadi, di mana kuantitas kasus yang ditangani tidak sepenuhnya mencerminkan efektivitas pencegahan. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 232 laporan, namun hanya 79 laporan yang ditindaklanjuti (BPS, 2024).

Good governance memiliki peran krusial dalam pencegahan *fraud* melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi dan pelaporan keuangan (Jubaedah, 2011). Melalui *good governance*, organisasi dapat memastikan kualitas

pelaporan keuangan yang diandalkan dalam pengambilan keputusan (Carcello, 2009). Meskipun penerapan prinsip *good governance* telah menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan *fraud*, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pencegahan *fraud*. Hal ini terlihar dari terhambatnya beberapa penyelesaian pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat melalui aplikasi *e-government* Pemerintah Kota Binjai (Irma, 2023).

Pada pemerintah Kota Binjai, salah satu penerapan *good governance* yang dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Binjai Smart City adalah dengan peluncuran *e-government*. Namun sayangnya, program ini mengalami banyak kendala seperti kurangnya sosialisasi dan sulitnya penggunaan aplikasi tersebut sehingga menyebabkan terhambatnya beberapa penyelesaian pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat (Irma, 2023).

Selain *good governance*, kompetensi aparatur negara juga menjadi faktor penting yang berpengaruh signifikan. Kompetensi aparatur mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan sesuai standar profesional. Aparatur yang kompeten dianggap mampu mengidentifikasi potensi risiko *fraud*, memahami prosedur pengendalian internal, serta menjalankan tugas dengan integritas sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Aparatur yang memiliki kemampuan memadai dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan baik dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan dana (Islamiyah, 2020).

Selain *good governance* dan kompetensi aparatur negara, variabel lain yang memegang peranan krusial dalam pencegahan *fraud* adalah *whistleblowing system* (Suasri, 2025). Menurut laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *whistleblowing system* tergolong efektif dalam pencegahan tindakan *fraud* dengan persentase di atas 30%. Meskipun sistem ini secara teori memiliki peran penting dalam mengurangi risiko kecurangan, namun pada praktiknya masih banyak pelapor yang enggan menggunakan sistem ini karena kekhawatiran akan kurangnya perlindungan hukum, risiko intimidasi, diskriminasi, bahkan kriminalisasi dari pihak yang dilaporkan (ACFE, 2019)

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Aparatur Negara terhadap Pencegahan *Fraud* di Pemko Binjai serta pengaruh *Whistleblowing System* dalam memoderasi *Good Governance* dan Kompetensi Aparatur Negara terhadap Pencegahan *Fraud* di Pemko Binjai.

HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis penelitian ini meliputi *Good Governance* dan Kompetensi aparatur negara berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* di Pemko Binjai serta *Whistleblowing system* memoderasi pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi aparatur negara terhadap Pencegahan *Fraud* di Pemko Binjai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menganalisis pengaruh *good governance*, kompetensi aparatur negara, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *saturation sampling* atau sampel jenuh. Populasi penelitian ini meliputi 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Binjai. Pihak yang akan menjadi responden adalah Kepala Dinas, Bendahara dan Kasubag di Pemerintah Kota Binjai, sehingga jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 orang. Dalam penelitian ini, peneliti

p-ISSN: 2808 – 8557
e-ISSN: 2808 – 8573

menggunakan jenis data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dan kuesioner yang telah dilakukan pengujian validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan Software smartPLS SEM (*Partial Least Square – Structural Equation Modeling*) dengan teknik analisa outer model, inner model, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Outer Model

Analisis model pengukuran (*outer model*) bertujuan untuk mengevaluasi variabel konstruk yang diteliti, validitas (ketepatan), dan reliabilitas (kehandalan) dari suatu variabel. Terdapat beberapa indikator dalam analisis outer model, diantaranya *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability.*

1) Convergent validity

Validitas konvergen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah pengukuran berkorelasi secara positif dengan pengukuran alternatif dari konstruk yang sama. Untuk melihat suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, maka dilihat dari nilai *outer loading*nya. Jika nilai *outer loading* lebih besar dari (0,7) maka suatu indikator adalah valid (Hair Jr, et.al, 2017)

Gambar 1 Struktural Model

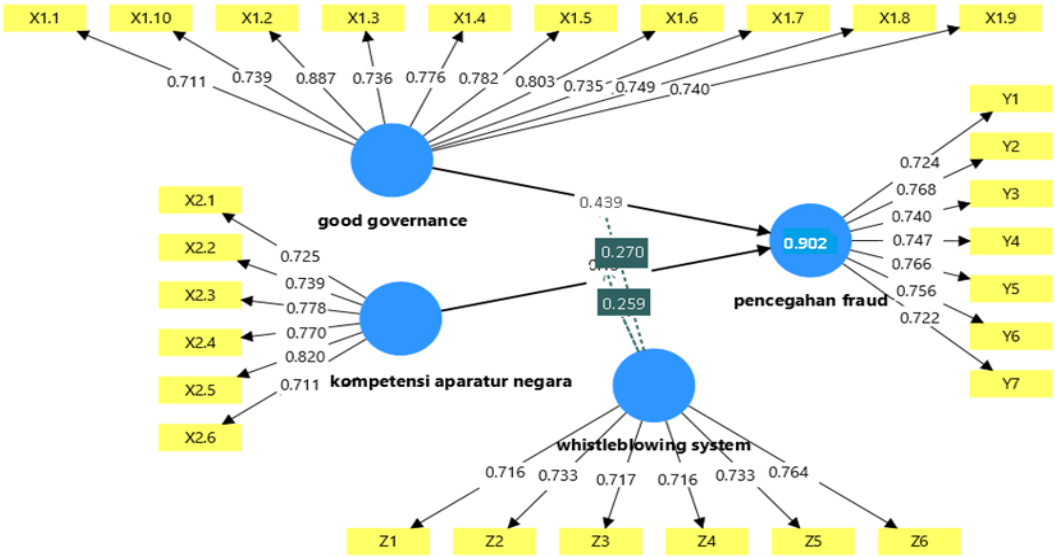

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan gambar, model yang diuji menunjukkan bahwa seluruh indikator (item pertanyaan) untuk setiap variabel, yaitu *good governance* (X_1), kompetensi aparatur negara (X_2), *whistleblowing system* (Z), dan pencegahan *fraud* (Y) dinyatakan valid dan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *outer loading* yang semuanya berada di atas 0.70, menunjukkan bahwa setiap indikator mampu mengukur variabel yang diwakilinya dengan akurat.

2) Discriminant Validity

Uji *discriminant validity* menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan telah memenuhi *discriminant validity* jika nilai *cross loading* indikator pada variabelnya merupakan nilai terbesar dibandingkan dengan variabel lain. Uji *discriminant validity* menggunakan nilai *Average Variant Extracted* (*AVE*) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus > 0,5 untuk model yang baik (Ghozali, 2017).

Tabel 1 Average Variant Extracted (AVE)

Variabel	Average Variant Extracted
good governance	0.779
kompetensi aparatur negara	0.735
pencegahan *fraud*	0.707
whistleblowing system	0.733

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel 1, diperoleh hasil bahwa nilai *AVE* variabel *good governance*, kompetensi aparatur negara, pencegehan *fraud* dan *whistleblowing system* > 0,500 maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik atau valid.

3) Composite Reliability

Composite Reliability adalah bentuk reliabilitas yang digunakan untuk menilai konsistensi hasil lintas item pada suatu tes yang sama. Pengujian konsistensi internal menggunakan nilai reliabilitas komposit dengan kriteria suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai reliabilitas komposit > 0,700 (Hair Jr, et.al, 2017).

Tabel 2 *Composite Reliability*

Variabel	*Composite Reliability*
good governance	0.864
kompetensi aparatur negara	0.810
pencegahan *fraud*	0.808
whistleblowing system	0.817

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.12 diperoleh hasil bahwa nilai *Composite reliability* dari variabel *good governance*, kompetensi aparatur negara, pencegehan *fraud* dan *whistleblowing system* > 0,700 maka dinyatakan bahwa setiap variabel adalah reliabel.

Inner Model

1) *R Square*

Koefisien Determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu variabel. Nilai *R Square* sebesar 0,75 menunjukkan model PLS yang kuat, *R Square* sebesar 0,50 menunjukkan model PLS yang moderat/sedang dan nilai *R Square* sebesar 0,25 menunjukkan model PLS yang lemah (Ghozali, 2016).

Tabel 3 *R Square*

Variabel	*R-square*	*R-square adjusted*
pencegahan *fraud*	0.902	0.891

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Pada tabel 3, diperoleh hasil pengaruh *good governance*, kompetensi aparatur negara, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* adalah sebesar 0,902, artinya besaran pengaruh 90,2%, hal ini berarti menunjukkan PLS yang kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan *good governance*, kompetensi aparatur negara dan penerapan whistleblowing system akan memberikan pengaruh kuat hingga 90,2% dalam upaya pencegahan *fraud.*

2) F Square

F-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai *F-square* sebesar > 0,35 dikategorikan sebagai pengaruh kuat, sedangkan Nilai *F-square* sebesar < 0,35 dikategorikan sebagai pengaruh lemah.

Tabel 4 *F-square*

Variabel	pencegahan *fraud*
good governance	0.580
kompetensi aparatur negara	0.475
whistleblowing system	0.505

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel 4, diperoleh hubungan *good governance* terhadap pencegahan *fraud*, kompetensi aparatur negara dan *whistleblowing system* memiliki nilai *F square* > 0,35 sehingga dikategorikan sebagai pengaruh kuat.

Pengujian Hipotesis

1) *Direct Effect*

Pengujian hipotesis pengaruh langsung bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara langsung (tanpa perantara). Jika nilai probabilitas (*P-Value*) < α (0,05) maka Ho ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan). Jika nilai probabilitas (*P-Value*) > α (0,05) maka Ho diterima (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak signifikan) (Hair Jr, et.al, 2017)

Tabel 4 *Direct Effect*

Variabel	*Cofficient*	*T statistics*	*P Values*
good governance -> pencegahan *fraud*	0.439	2.986	0.004
kompetensi aparatur negara -> pencegahan *fraud*	0.337	2.413	0.001

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel 4, diperoleh pengaruh langsung variabel *good governance* terhadap pencegahan *fraud* mempunyai koefisien jalur sebesar 0,439 (positif), maka peningkatan nilai variabel *good governance* akan diikuti peningkatan variabel pencegahan *fraud*.

Pengaruh langsung variabel kompetensi aparatur negara terhadap variabel pencegahan *fraud* mempunyai koefisien jalur sebesar 0,337 (positif), maka peningkatan nilai variabel kompetensi aparatur negara akan diikuti peningkatan variabel pencegahan *fraud*.

2) Efek Moderasi

Pengujian hipotesis pengaruh moderasi bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara tidak langsung (dengan perantara).

Tabel 5 Efek Moderasi

Variabel	*Cofficient*	*T statistics*	*P Values*
whistleblowing system x *good governance* -> pencegahan *fraud*	0.270	1.988	0.003
whistleblowing system x kompetensi aparatur negara -> pencegahan *fraud*	0.259	1.836	0.003

Sumber: Data olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel 5, diperoleh pengaruh moderasi variabel *good governance* terhadap variabel pencegahan *fraud* dimoderasi *whistleblowing system* mempunyai koefisien jalur sebesar 0,270 (positif), maka variabel *whistleblowing system* memoderasi peningkatan nilai variabel *good governance* yang akan diikuti peningkatan variabel pencegahan *fraud*.

Pengaruh moderasi variabel kompetensi aparatur negara terhadap variabel pencegahan *fraud* dimoderasi *whistleblowing system* mempunyai koefisien jalur sebesar 0,259 (positif), maka variabel *whistleblowing system* memoderasi peningkatan nilai variabel kompetensi aparatur negara yang akan diikuti peningkatan variabel pencegahan *fraud*.

Pengaruh *Good Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X_1 (*good governance*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (pencegahan *fraud*), yang ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,439. Koefisien jalur sebesar 0,439 ini berarti bahwa setiap peningkatan pada nilai *good governance* akan diikuti oleh peningkatan pada upaya pencegahan *fraud*. Dengan kata lain, semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu organisasi, maka semakin efektif pula upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud*. Dengan demikian, *good governance* pada lingkungan Pemerintah Kota Binjai merupakan faktor kunci dalam membangun lingkungan kerja yang bersih dari *fraud* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Negara terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X_2 (kompetensi aparatur negara) memiliki koefisien jalur sebesar 0,337 dengan arah positif, yang berarti peningkatan kompetensi aparatur negara diikuti oleh peningkatan variabel pencegahan *fraud*. Pengaruh ini signifikan secara statistik, ditunjukkan oleh nilai Tstatistic 2,413 yang lebih besar dari T tabel 1,67 dan P-Values sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kompetensi aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dalam pencegahan *fraud* sudah berjalan dengan baik.

Pengaruh *Good Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* dimoderasi *Whistleblowing System*

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing system* secara signifikan memoderasi pengaruh variabel *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dengan koefisien jalur sebesar 0,270 yang bernilai positif. Artinya, keberadaan *whistleblowing system* memperkuat hubungan positif antara *good governance* dan pencegahan *fraud*. Dengan kata

lain, peningkatan *good governance* akan lebih efektif dalam mencegah *fraud* apabila didukung oleh *whistleblowing system* yang baik sehingga Pemerintah Kota Binjai perlu mengoptimalkan sistem pelaporan dan perlindungan pelapor untuk meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* secara menyeluruh.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Negara terhadap Pencegahan *Fraud* dimoderasi *Whistleblowing System*

Hasil analisis menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memoderasi pengaruh variabel kompetensi aparatur negara terhadap pencegahan *fraud* dengan koefisien jalur sebesar 0,259 yang bernilai positif. Artinya, dalam konteks moderasi oleh *whistleblowing system*, peningkatan kompetensi aparatur negara juga diikuti oleh peningkatan pencegahan *fraud*. Nilai Tstatistic sebesar 1,836 yang lebih besar dari T tabel 1,67 dan P-Values sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 menegaskan bahwa efek moderasi ini signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan *whistleblowing system* Pemerintah Kota Binjai mampu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur negara terhadap pencegahan *fraud*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* dan kompetensi aparatur negara memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Begitu pula dengan *whistleblowing system* yang memoderasi pengaruh *good governance* dan kompetensi aparatur negara terhadap pencegahan *fraud*. Namun sistem ini masih perlu dikembangkan agar menjadi saluran yang aman bagi individu untuk melaporkan pelanggaran, kecurangan, atau praktik tidak etis tanpa takut akan pembalasan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan internal terhadap komitmen organisasi dalam praktik pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

REFERENSI

Adams, F. (2019). *Democracy and good governance. Dollar diplomacy*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315201764-6

Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *6*(2), 63–74. https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138

Anandarajan, A., & Kleinman, G. (2011). The impact of cognitive biases on fraudulent behaviour: The Leeson case. *International Journal of Behavioural Accounting and Finance*, *2*, 40–55. https://doi.org/10.1504/IJBAF.2011.038756

Arpani, M. L., Silfi, A., & Anggraini, L. (2022). Pengaruh *whistleblowing system*, kompetensi aparatur dan kesadaran anti kecurangan terhadap pencegahan kecurangan (Studi empiris pada OPD Kota Pekanbaru Provinsi Riau). *SYNERGY: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *1*(2), 34–44.

Ashilah, D., Qintharah, Y. N., & Fajarwati, D. (2023). Implementation of good corporate governance, internal audit, and whistleblowing system against fraud prevention. *International Journal of Business and Quality Research*, *1*(1), 152–170. Retrieved from https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/IJBQR/article/view/270

Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). *Survei fraud Indonesia 2019*. Indonesia Chapter #111, *53*(9), 1–76. Retrieved from https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/

Badriyah, N., & Binawati, E. (2022). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada

Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, *II*(1), 32-49. 10.32477/jrabi.v2i1.419

Bosko, M. D., Asyik, N., & Ardini, L. (2023). The influence of financial reporting compliance, apparatus competence, and internal control systems on fraud prevention in village fund management (Study of village government in Sikka Regency). *Journal Of Economics, Finance And Management Studies*. https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i12-16

BPS. (2024). *Banyaknya perkara yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Binjai*. Retrieved from https://binjaikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjcyIzI=/banyaknya-perkara-yang-diselesaikan-oleh-kejaksaan-negeri-binjai.html

Carcello, J. (2009). Governance and the common good. *Journal of Business Ethics*, *89*, 11–18. https://doi.org/10.1007/S10551-008-9904-Z

Chairi, N., Indriani, M., & Darwanis, D. (2022). Kompetensi, moralitas dan sistem *whistleblowing* dalam pencegahan fraud: Studi empiris pada organisasi pemerintahan Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12655

Chenkiani, P., & Prasetyo, A. (2023). Fraud dan monitoring dalam perspektif teori keagenan. *Jurnal Akuntansi*, *12*(2), 171–180. https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1016

Cho, Y., & Song, H. (2015). Determinants of whistleblowing within government agencies. *Public Personnel Management*, *44*, 450–472. https://doi.org/10.1177/0091026015603206

Daniar Paramita, R. W., & Rizal, N. (2021). *Metode penelitian kuantitatif* (3rd ed.). Widya Gama Press.

De Sena Portugal Dias, A. A. (2021). Risks and fraud: A theoretical approach. *Revista Perspectiva Empresarial*. https://doi.org/10.16967/23898186.712

Dewata, E., Farah, E. H., Jauhari, H., & Sari, Y. (2022). Good governance and internal control on the prevention of fraud in the procurement of goods and services for government agencies. *Proceedings of the 5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)*. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220202.026

Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, praktik akuntabilitas, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (Studi empiris pada desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*. https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870

Dewi, N. L. G. K., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh *whistleblowing system*, *good government governance* dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*. https://doi.org/10.32795/hak.v3i4.3479

Duma Megaria Elisabeth, B. B., & Saragih, R. B. (2023). Pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, *good governance*, dan sistem pengendalian internal terhadap upaya pencegahan fraud pada Pemerintahan Kabupaten Samosir. *Jurnal Ilmiah Accusi*, *5*(2), 118–127. https://doi.org/10.36985/rmmyrc67

Edy, I. C., Marsono, S., & Haryanti, S. S. (2022). Prediction orientation: The role of good school governance and internal control systems in moderating the influence between proactive fraud audits on fraud prevention. *International Journal Of Trends In Accounting Research*. https://doi.org/10.54951/ijtar.v3i1.148

Fitri, F., Syukur, M., & Justisa, G. (2019). Do the fraud triangle components motivate fraud in Indonesia?. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*. https://doi.org/10.14453/aabfj.v13i4.5

Gharrafi, M., Mahouat, N., Mohammed, K., Kobi, H., & Benlakouiri, A. (2024). The importance of good corporate governance practices and internal audit in the prevention

of fraud : The case of Moroccan public enterprise. *Pakistan Journal of Criminology*, *16*(04), 781–796.

Ghozali, I., & Latan, H. (2020). *Partial least squares: Konsep, metode dan aplikasi menggunakan program WARPPLS 7.0* (4th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gishella Avillia Wiguna, & Sofie Sofie. (2023). Pengaruh teknologi informasi, pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan anti-fraud awareness terhadap pencegahan fraud (Studi kasus pada PT. Hexa Daya Solusi). *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, *1*(5), 206–217. https://doi.org/10.54066/jikma.v1i5.796

Heras, R. L., & Fernández, D. D. (2021). The labor segregation by gender: An application of "pollution theory". *Cuadernos de Economía*, *44*(125), 79–96.

Irma, N., Ginting, B., Agusmidah, & Leviza, J. (2023). Penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *2*(6), 454-456. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.168

Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *8*(1), 1–13. https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452

Johan, A., Khairusy, M., Nugraha, N., & Sriwardini, S. (2022). Preventing fraud through internal audit and whistleblowing system. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*. https://doi.org/10.36555/jasa.v6i2.1769

Jubaedah, E. (2011). Implementasi kebijakan transparansi keuangan di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *VIII*(34), 288–299.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues*. World Bank. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/4e535db9-672d-5897-a6cd-feb4df55208f

Kesuma, A. P., & Fachruzzaman, F. (2024). Analysis of internal control and fraud prevention efforts in public sector accounting. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(1), 1361–1368. https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5212

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2008). *Pedoman sistem pelaporan pelanggaran - SPP (Whistleblowing System - WBS)*. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Kompas. (2024, September 1). *Korupsi proyek fiktif Rp 640 juta, eks Kadisdik Binjai ditahan*. Kompas. Retrieved from https://medan.kompas.com/read/2024/09/01/115335678/korupsi-proyek-fiktif-rp-640-juta-eks-kadisdik-binjai-ditahan

Kurrohman, T., P, H. S. D., Resha, P. A., Ekonomi, F., & Jember, U. (2024). Konstruksi model pencegahan fraud melalui *Red Flag Based System* di Pemerintah Kabupaten Jember (Studi kasus di Inspektorat kabupaten Jember) Constructing fraud prevention model through *Red Flag-Based System* in the Jember Regency Government (A case stud). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *11*(1), 72–76.

Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *26*(3), 2155–2182. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18

Linder, S., & Foss, N. (2013). Agency theory. *Corporate Governance & Finance EJournal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2255895

Lootah, M., Gleason, K., Smith, D., & Zoubi, T. (2024). Fraud risk of sovereign wealth funds: Fraud triangle and agency theory perspectives. *Journal of Financial Crime*. https://doi.org/10.1108/jfc-05-2024-0155

Loyens, K., & Vandekerckhove, W. (2018). Whistleblowing from an international perspective: A comparative analysis of institutional arrangements. *Administrative Sciences*. https://doi.org/10.3390/ADMSCI8030030

Lubis, H. Z., Sari, M., Ramadhany, A. A., Ovami, D. C., & Brutu, I. R. (2024). Effect of internal audit, internal control, and audit quality on fraud prevention: Evidence from the public sector in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*. https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.04

Mediasi, V., & Aprilia, P. (2024). Pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan fraud dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi. *AKUNTANSI 45*. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2460

Nafisah, M. Y., & Witono, B. (2024). Pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual, *good governance*, dan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap pencegahan fraud pada keuangan daerah. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(1), 14–31.

Periansya, P., Dewata, E., R., S., Sari, Y., & Basyith, A. (2023). Whistleblowing, fraud prevention, and fraud awareness: Evidence from the Palembang Local Government of Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*. https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.51

Permana, Y., & Eftarina, M. (2020). Peran *whistleblowing system* dalam memoderasi pengaruh skeptisisme professional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2014–2019. https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6836

Prameswari, K. S., Ayu, P., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). Pengaruh *whistleblowing*, SPIP, *good governance*, dan kompetensi terhadap pencegahan fraud dana desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*. https://doi.org/10.32795/hak.v3i4.3466

Putro, H. C. (2022). Prevention of goods and services procurement fraud and its implications on good government governance. *Jurnal Audit, Pajak, Akuntansi Publik (AJIB)*. https://doi.org/10.32897/ajib.2022.1.2.1828

Rahman, M., & Jie, X. (2022). Fraud detection using fraud triangle theory: Evidence from China. *Journal of Financial Crime*. https://doi.org/10.1108/jfc-09-2022-0219

Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara*.

Rohmatin, B. L., Apriyanto, G., & Zuhroh, D. (2021). The role of good corporate governance to fraud prevention: An analysis based on the fraud pentagon. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. https://doi.org/10.26905/JKDP.V25I2.5554

Romadaniati, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud pada pemerintahan desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi (Studi pada desa-desa di Kabupaten Bengkalis). *4*, 227–237. Retrieved from https://consensus.app/papers/pengaruh-kompetensi-aparatur-desa-sistem-pengendalian-romadaniati-taufik/123d7a91ad4e53b9a1c9cab796c449d9/

Sa'idah, N. S., Huda, N., & Juwani, J. (2024). Pengaruh working capital turnover (WCT) dan debt to equity ratio (DER) terhadap return on assets (ROA) pada PT. Mustika Ratu Tbk. *GANEC SWARA*. https://doi.org/10.35327/gara.v18i3.919

Safitri, N., & Andhaniwati, E. (2024). The determinants of fraud prevention in government agencies. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*. https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.11097

Sari, R. D. P. (2023), Pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, whistleblowing, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (Studi empiris pada pemerintah desa di Kabupaten Bangka Tengah). *2*(4), 1–12. Retrieved from http://repository.ubb.ac.id/6668/

Suasri, E. (2025). Pengaruh sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. *Monex Journal of Accounting Research Vol. 14 No.1* https://doi.org/10.30591/monex.v14i1.7805

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alphabet.

Sujana, I., Suardikha, I., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing system, competence, morality, and internal control system against fraud prevention on village financial management in Denpasar. *European Journal of Anaesthesiology*, *30*, 2780–2794. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.V30.I11.P06

Suryandari, N., Yadnyana, I., Ariyanto, D., & Erawati, N. M. R. (2023). Implementation of fraud triangle theory: A systematic literature review. *Journal of Governance and Regulation*. https://doi.org/10.22495/jgrv12i3art10

Tarigan, J. I., & Sari, E. N. (2021). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, *22*(2), 175–205.

Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2024*. Retrieved February 20, 2025, from https://www.transparency.org/en/cpi/2024

Usman. (2021). *Influence of whistleblowing systems, effectiveness of intenal audits and good government governance on fraud prevention (Survey on provincial and district government / city of Gorontalo-Indonesia)*. Retrieved from https://consensus.app/papers/influence-of-whistleblowing-systems-effectiveness-of-usman/810ae699ea0c5a649073cc4ab6d69ddc/

Wells, J. T. (2016). *Corporate fraud handbook: Prevention and detection*. John Wiley & Sons.

Yudhasena, I. G. I., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2019). Pengaruh *good government governance*, pengendalian intern, dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *28*, 434. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p17

Yulian Maulida, W., & Indah Bayunitri, B. (2021). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, *2*(4), 275–294. https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177